

**RIVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Lamongan

VISI : *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*

MISI :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Progarm	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	90%	90%	90%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	90%	90%	90%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	96%	97%	98%	99%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	96%	97%	98%	99%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum dan pembebasan biaya perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	15	16	17
	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum dan pembebasan biaya perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni
	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin	Peningkatan mutu konsultasi dan pembuatan dokumen perkara	* Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan * Perbaikan MOU
	Prosentase putusan yang di unggah (upload ke website Prosentase pelayanan meja informasi	96% 100%	97% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	96% 100%	97% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online	Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi * Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	15	16	17
	Prosetase Minutasi berkas perkara tepat waktu	96%	97%	98%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	96%	97%	98%	99%	99%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian berita acara dan putusan	Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP	<ul style="list-style-type: none"> * Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaikan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan administrasi penerimaan perkara	Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses administrasi penerimaan perkara * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu	87%	89%	90%	90%	90%	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	87%	89%	90%	90%	90%	Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses persidangan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP	Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses pembuatan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan para pihak tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan penyampian salinan putusan / penetapan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dalam penerbitan akta cerai	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	15	16	17
	Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai	Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	<ul style="list-style-type: none"> * Koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Perbaikan MOU
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Prosentase penurunan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99%	99%	99%	99%	Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Percepatan penyelesaian putusan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindak lanjut	Peningkatan kualitas pelayanan permohonan eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> * Percepatan proses pelaksanaan eksekusi * Koordinasi antar instansi terkait
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel * Penyempurnaan SOP Pengaduan



Drs. H. HANAFIAH D., M.H.
NIP. 196712311989032017

Panitera

Drs. H. MACHSUN, S.H., M.H.
NIP. 19570507 198303 1 001

Lamongan, 03 Januari 2017
Sekretaris

H. IUNUS SUSANTO, S.H.
NIP. 19591027 198003 1 001